

**ANALISIS PELUANG DAN TANTANGAN KERJA SAMA *SISTER CITY*
KOTA MAKASSAR DAN GOLD COAST QUEENSLAND DALAM
BIDANG PARIWISATA**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Departemen
Ilmu Hubungan Internasional*

OLEH:

SITI NURHALIZAH TAKDIR

E061201031

**DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

2024

HALAMAN JUDUL

SKRIPSI

**ANALISIS PELUANG DAN TANTANGAN KERJA SAMA *SISTER CITY*
KOTA MAKASSAR DAN GOLD COAST QUEENSLAND DALAM
BIDANG PARIWISATA**

Disusun dan diajukan oleh

SITI NURHALIZAH TAKDIR

E061201031

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada

Departemen Ilmu Hubungan Internasional,

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin

DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2024

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : ANALISIS PELUANG DAN TANTANGAN KERJA SAMA
SISTER CITY KOTA MAKASSAR DAN GOLD COAST
QUEENSLAND DALAM BIDANG PARIWISATA

N A M A : SITI NURHALIZAH TAKDIR

N I M : E061201031

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Makassar, 2 Mei 2024



Mengetahui :

Pembimbing I,

Prof. H. Darwis, MA, Ph.D
NIP. 196201021990021003

Pembimbing II,

Abdul Razaq Z Cangara, S.IP, M.Si, MIR
NIP. 198909132020053001

Mengesahkan :
Sekretaris Departemen Hubungan Internasional,



Aswin Baharuddin, S.IP, MA.
NIP. 198607032014041002

DEPARTEMEN HUBUNGAN INTERNASIONAL FISIP UNHAS

HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : ANALISIS PELUANG DAN TANTANGAN KERJA SAMA
SISTER CITY KOTA MAKASSAR DAN GOLD COAST
QUEENSLAND DALAM BIDANG PARIWISATA

NAMA : SITI NURHALIZAH TAKDIR

NIM : E061201031

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Jum'at, 26 April 2024.

Ketua : Prof. H. Darwis, MA, Ph.D

Sekretaris : Atika Puspita Marzaman, S.IP, MA

Anggota : 1. Drs. Munjin Syafik Asy'ari, M.Si.

2. Agussalim, S.IP, MIRAP

3. Abdul Razaq Z Cangara, S.IP, M.Si, MIR

DEPARTMEN HUBUNGAN INTERNASIONAL FISIP UNHAS

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Nurhalizah Takdir
NIM : E061201031
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul:

“Analisis Peluang dan Tantangan Kerja Sama *Sister City* Kota Makassar dan Gold Coast Queensland dalam Bidang Pariwisata”

Merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah hasil karya orang lain, kecuali kutipan dan ringkasan yang telah saya jelaskan sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 1 Mei 2024

Yang menyatakan

Siti Nurhalizah Takdir



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat diberi kesempatan menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Analisis Peluang dan Tantangan Kerja Sama *Sister City* Kota Makassar dan Gold Coast Queensland dalam Bidang Pariwisata” untuk memenuhi syarat dalam mendapatkan gelar sarjana dari Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Serta tidak lupa penulis kirimkan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya yang telah memberikan arahan dan tuntunan kepada umatnya menuju kehidupan yang lebih baik.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, dengan rendah hati, penulis mengharapkan umpan balik, baik berupa kritik maupun saran dari para pembaca yang dapat membantu dan menjadi masukan bagi penulis. Sejatinya, kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, maka penulisan serta penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. **Allah SWT** yang senantiasa memberikan rahmat, hidayah, petunjuk, serta kekuatan kepada penulis. Atas ridho dan kehendak-Nya, penulis dapat menyelesaikan studi dengan skripsi ini.

2. Kedua orang tua penulis, **Ayahanda Takdir** dan **Ibunda Rahmayanti**. Terima kasih kepada keduanya karena tidak pernah menyerah dan selalu memberikan dukungan kepada penulis sejak kecil. Terima kasih atas doa, kasih sayang, dan perhatian yang menemani penulis sejak awal hingga selesainya skripsi ini. Semoga di masa depan penulis dapat memberikan kebahagiaan yang lebih besar kepada keduanya.
3. Adik-adik tercinta penulis, yaitu **Silo, Saki, dan Rara** yang senantiasa mendukung dan mendoakan kelancaran penyusunan skripsi ini. Dan juga terima kasih kepada **Tante Reksi** yang selalu penulis repotkan untuk mengantar penulis kesana-kemari selama penelitian.
4. Rektor Universitas Hasanuddin, Bapak **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.** dan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Bapak **Prof. Dr. phil Sukri, M.Si** beserta jajarannya.
5. Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Bapak **Prof. H. Darwis, MA., Ph.D** atas saran dan arahan dalam proses penyusunan skripsi ini selaku pembimbing I.
6. Kak **Abdul Razaq Z. Cangara, S.IP., M.Si., MIR** selaku pembimbing II. Penulis berterima kasih banyak atas bimbingan, arahan, saran, serta waktu yang telah diberikan.
7. Seluruh dosen Departemen Ilmu Hubungan Internasional yang telah menyumbang banyak ilmu kepada penulis; Bapak **Drs. Patrice Lumumba, MA**, Bapak **Drs. Munjin Syafik Asy'ari, M.Si.**, Bapak

Alm. Drs. Aspiannor Masrie, M.Si., Bapak Agussalim, S.IP., MIRAP., Bapak Drs. H. M. Imran Hanafi, MA., M.Ec., Bapak Drs. H. Husain Abdullah, M.Si., Bapak Muhammad Nasir Badu, Ph.D., Bapak Dr. Adi Suryadi B, M.A., Bapak Ishaq Rahman, S.IP., MSi., Bapak Burhanuddin, S.IP., M.Si., Ibu Pusparida Syahdan, S.Sos., M.Si., Kak Aswin Baharuddin, S.IP., MA., Kak Nurjannah Abdullah, S.IP., MA., Kak Biondi Sanda Sima, S.IP., M.Sc.,L.LM., Kak Bama Andika Putra, S.IP., M.IR., Kak Ashry Sallatu, S.IP., M.Si., dan Kak Atika Puspita Marzaman, S.IP, MA.

8. Staf akademik Departemen Ilmu Hubungan Internasional, **Bu Rahmah** dan **Pak Ridho** atas bantuannya dalam pengurusan berkas-berkas serta segala urusan administrasi.
9. Sahabat-sahabat penulis yang selalu percaya dan menjadi tempat bercerita keluh kesah dan sandaran. **Jessica, Thania,** dan **Jasmine,** terima kasih atas dukungan serta doanya. *I love you guys as much as I love Nevermoor.*
10. **Iqbal, Kak Alif,** dan **Leo** atas bantuannya selama perkuliahan dan juga proses penyusunan skripsi ini. Serta kepada teman-teman ALTERA 2020, **Ashar, Deisly,** dan semua nama yang tidak dapat penulis tuliskan satu persatu, terima kasih atas masa perkuliahan yang penuh cerita dan pengalaman.

11. Teman-teman SDGs KKNT *Smart Campus* Gelombang 110, yakni **Shita, Kenzy, Naufal, Geby, Firan, Echa, Acil, Jaya, Tasya**, dan **Ucil** atas dukungannya.
12. Dan lagi-lagi kepada teman-teman penulis, **Ayyub, Angel, Ica, Vea, Ruri**, dan **Sasy**. Terima kasih sudah menjadi rumah kedua bagi penulis.
13. Bapak **Andi Zulfitra Dianta, S.IP, M.A**, Kepala Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kota Makassar dan Bapak **Safaruddin, S.S**, Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Pemerintah Kota Makassar yang telah bersedia melakukan wawancara untuk kebutuhan penelitian penulis.
14. Teman-teman mutual twitter yang menjadi penyemangat dan hampir tidak pernah gagal membuat penulis tertawa.
15. *Last but not least*, kepada penulis sendiri, **Siti Nurhalizah Takdir**. Terima kasih telah berjuang dan pantang menyerah dalam menyusun skripsi ini. Semoga di masa depan dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan berhasil membanggakan orang-orang terkasih.

ABSTRAK

Siti Nurhalizah Takdir, E061201031, "Analisis Peluang dan Tantangan Kerja Sama *Sister City* Kota Makassar dan Gold Coast Queensland dalam Bidang Pariwisata" dibawah bimbingan Prof. H. Darwis, MA., Ph.D selaku pembimbing I dan H. Abdul Razaq Z. Cangara, S.IP., M.Si., M.IR selaku pembimbing II pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peluang dan tantangan kerja sama *sister city* Kota Makassar dan Gold Coast dalam bidang pariwisata. Adapun, tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode analisis deduktif. Terdapat dua jenis data yang digunakan, yaitu data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara bersama narasumber yang berupa Kepala Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kota Makassar dan Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Kota Makassar.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kerja sama *sister city* Kota Makassar dan Gold Coast dalam bidang pariwisata memiliki beberapa peluang, yaitu adanya hubungan bilateral Indonesia dan Australia yang mendasari dan mendukung kerja sama mereka, serta kesamaan karakteristik daerah pesisir, kondisi pariwisata, telah tersedianya MoU *sister city* kedua kota, dan juga ASEAN-Australia *Smart Cities Trust Fund*. Melalui peluang-peluang tersebut, kerja sama *sister city* antara kedua kota dalam bidang pariwisata diharapkan dapat dilanjutkan dan terus berjalan di masa depan. Namun, dalam pelaksanaannya juga terdapat tantangan, meliputi pandemi COVID-19, kurangnya koordinasi dalam kerja sama, baik secara internal maupun eksternal, perbedaan bahasa dan budaya antara kedua kota, serta tidak adanya penerbangan langsung antara Gold Coast dan Makassar yang dapat mempersulit terjadinya pertukaran wisatawan.

Kata Kunci: Sister City, Pariwisata, Peluang, Tantangan, Kerja Sama Internasional

ABSTRACT

Siti Nurhalizah Takdir, E061201031, "Analysis of Opportunities and Challenges of Sister City between Makassar and Gold Coast Queensland in the Tourism Sector" under the guidance of **Prof. H. Darwis, MA., Ph.D** as supervisor I dan **H. Abdul Razaq Z. Cangara, S.IP., M.Si., M.IR** as supervisor II at the Department of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University.

This study aims to determine the opportunities and challenges of sister city cooperation between Makassar and Gold Coast in the tourism sector. The type of research used is qualitative research with deductive analysis method. There are two types of data used, primary data and secondary data, with data collection techniques through literature studies and interviews with the Head of Makassar City Regional Secretariat Cooperation Section and the Head of Makassar City Tourism Destination Development Division.

The results of this study show that the sister city between Makassar and Gold Coast in the tourism sector has several opportunities, namely the existence of bilateral relations between Indonesia and Australia which underlie and support their cooperation, as well as the similar characteristics of coastal areas, tourism conditions between the cities, the availability of a sister city MoU, and the ASEAN-Australia Smart Cities Trust Fund. Through these opportunities, it is hoped that the sister city cooperation between Makassar and Gold Coast in tourism sector can be continued in the future. However, in its implementation there are also challenges, including the COVID-19 pandemic, lack of coordination in cooperation, both internally and externally, language and cultural differences, and the absence of direct flights between Gold Coast and Makassar which can make it difficult for tourist exchanges to occur.

Keywords: Sister City, Tourism, Opportunities, Challenges, International Cooperation

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR BAGAN.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Batasan dan Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
1.4 Kerangka Konseptual.....	8
1.5 Metode Penelitian.....	18
1.6 Sistematika Penulisan.....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
2.1 Paradiplomasi.....	23
2.2 Kerja Sama Internasional.....	29
2.3 <i>Sister City</i>	38
2.4 Penelitian Terdahulu.....	47
BAB III GAMBARAN UMUM.....	50
3.1 Sejarah dan Perkembangan <i>Sister City</i>	50
3.2 Kerja Sama <i>Sister City</i> Kota Makassar dan Kota Gold Coast.....	54

3.3 Potensi Pariwisata Kota Makassar dan Kota Gold Coast.....	63
3.3.1 Potensi Pariwisata Kota Makassar.....	64
3.3.2 Potensi Pariwisata Kota Gold Coast.....	71
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	77
4.1 Peluang Kerja Sama <i>Sister City</i> Kota Makassar dan Kota Gold Coast Queensland dalam Bidang Pariwisata.....	77
4.2 Tantangan Kerja Sama <i>Sister City</i> Kota Makassar dan Kota Gold Coast Queensland dalam Bidang Pariwisata.....	102
4.3 Evaluasi Terhadap Dinamika Peluang dan Tantangan Kerja Sama <i>Sister City</i> Kota Makassar dan Kota Gold Coast Queensland dalam Bidang Pariwisata.....	116
BAB V PENUTUP.....	119
5.1 Kesimpulan.....	119
5.2 Saran.....	121
DAFTAR PUSTAKA.....	122
LAMPIRAN.....	132
Lampiran 1 (Transkrip Wawancara).....	132
Lampiran 2 (Transkrip Wawancara).....	140
Lampiran 3 (Dokumentasi).....	148
Lampiran 4 (<i>Letter of Intent Sister City</i> Makassar dan Gold Coast).....	149
Lampiran 5 (<i>Memorandum of Understanding Sister City</i> Makassar dan Gold Coast).....	151

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1	Kerangka Konseptual Penelitian.....	18
-----------	-------------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Penandatanganan LoI <i>Sister City</i> Kota Makassar dan Gold Coast.....	57
Gambar 3.2	Forum Pariwisata Australia-Indonesia Timur.....	58
Gambar 3.3	Penandatanganan MoU <i>Sister City</i> Kota Makassar dan Gold Coast.....	60
Gambar 3.4	<i>Twinning City</i> ASEAN-Australia <i>Smart Cities Trust Fund</i>	62
Gambar 4.1	Pulau Samalona.....	90
Gambar 4.2	Tallebudgera Creek.....	90

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suatu negara tidak dapat berdiri sendiri dan sejatinya memerlukan hubungan dan bantuan dari negara lain. Hal tersebut dikarenakan suatu negara memiliki kelebihan serta kekurangannya masing-masing. Untuk memenuhi keterbatasan tersebut, diperlukan hubungan saling melengkapi dari negara lain untuk menemukan solusi dari permasalahan mereka. Negara dapat memanfaatkan keunggulan yang dimilikinya, seperti sumber daya alam, teknologi, atau keahlian tertentu, sementara kekurangan yang dimilikinya dapat diatasi melalui kerja sama atau kemitraan dengan negara lain (Mutmainah et al., 2019). Rumengan (2009), menjelaskan bahwa faktor utama kerja sama antar negara dilakukan adalah globalisasi. Adanya globalisasi menyebabkan perubahan dalam tatanan sosial secara global maupun nasional, sehingga negara harus menyesuaikan diri untuk tetap bertahan. Karena itulah, kerja sama internasional sangat penting dalam memajukan serta meningkatkan kualitas suatu negara.

Untuk meningkatkan kualitas negara tersebut, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah saling terkait satu sama lain, karena tolak ukur tidak hanya dilihat melalui keberhasilan negara secara keseluruhan, namun juga wilayah dan kota-kota dalam negara. Diperlukan peningkatan efisiensi tata kelola dan daya saing daerah. Karena itu, pemerintah daerah diharapkan juga ikut terlibat dalam hubungan internasional. Salah satu bentuk partisipasi pemerintah daerah dalam

hubungan internasional adalah kerja sama *sister city* (Damayanti, 2018). Secara umum, *sister city* sendiri dapat didefinisikan sebagai kerja sama yang melibatkan dua kota dari negara berbeda melalui perjanjian resmi, dengan tujuan mengedepankan perdamaian dan persahabatan. Salah satu karakteristik penting dari kerja sama ini adalah alih-alih berasal dari pemerintah pusat, *sister city* merupakan inisiatif yang datang dari tingkat lokal atau pemerintah daerah. Namun walaupun seperti itu, persetujuan dari kementerian luar negeri tetap diperlukan (Campbell, 2015).

Sister Cities International mendefinisikan *sister city* sebagai kerja sama yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh dua kota besar atau kecil dari negara berbeda yang bekerja sama berdasarkan perjanjian formal untuk jangka panjang. *Sister city* dapat dilakukan dalam berbagai bidang, meliputi pendidikan, budaya, ekonomi, lingkungan, pariwisata, dan bidang-bidang lainnya. Kerja sama *sister city* ini diharap dapat menjadi jembatan untuk pemerintah daerah maupun pemerintah kota untuk mencapai tujuan serta memajukan dan mensejahterakan kotanya. Melalui program ini, kedua kota yang terlibat dapat saling bertukar informasi serta mempererat persahabatan antara pemerintah lokal (Sulthoni, 2021).

Seperti banyaknya negara lain, Indonesia juga turut aktif melakukan hubungan kerja sama antar negara. Adapun salah satu mitra terdekatnya adalah Australia. Keduanya kerap bekerja sama di berbagai bidang, termasuk ekonomi, politik, keamanan, hingga lingkungan. Dengan melihat letak geografis kedua negara yang strategis, tidak membingungkan jika hubungan Indonesia dan

Australia hingga saat ini masih berjalan (Gusrini, 2020). Contoh kerja sama terbaru antara keduanya adalah IA-CEPA atau *Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement* (Kementerian Luar Negeri, 2021). Indonesia dan Australia tidak hanya bekerja sama pada tingkat negara atau pemerintah pusat, namun juga pada tingkat pemerintah daerah, seperti melalui program kerja sama *sister city*, sebagaimana yang tercantum pada pilar kedua IA-CEPA (Ardha, 2019).

Australia dan Indonesia mempunyai program kerja sama *sister city*, meliputi Kota Semarang dan Brisbane yang terjalin pada tahun 1991 (Putri, 2022), Padang dan Fremantle tahun 2018 (Topsumbar, 2022), Ambon dan Darwin tahun 2018 (Marasabessy, 2023), Makassar dan Gold Coast tahun 2019 (Kementerian Luar Negeri RI, 2019), Denpasar dan Perth tahun 2020 (Tauhid, 2023), Denpasar dan Darwin tahun 2022 (Dinas Kominfo Statistik Denpasar, 2022), Bandung dan Melbourne tahun 2023 (Ripaldi, 2023), serta pembaharuan kerja sama *sister city* antara Kupang dan Palmerston pada tahun 2006 yang sempat terhenti (Victory News, 2023). Kerja sama *sister city* tersebut dilakukan agar tersedianya wadah yang menyediakan kesempatan kepada kota yang bekerja sama untuk melakukan pertukaran pengalaman dalam mengelola bidang-bidang kerja sama yang telah disepakati. Penulis secara spesifik tertarik akan kerja sama *sister city* antara Kota Makassar dan Gold Coast karena potensinya dalam bidang pariwisata.

Sister city antara kedua kota tersebut berawal dari inisiatif Pemerintah Gold Coast yang ingin bekerja sama dalam program *sister city* dengan Makassar. Wali Kota Gold Coast menyampaikan inisiatifnya tersebut pada 11 November

2018 saat dilaksanakannya kunjungan bilateral. Setelah itu, pada tanggal 4 Maret 2019, dilakukan penandatanganan *Letter of Intent* (LoI) oleh Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto, dan Wali Kota Gold Coast, Tom Tate. Penandatanganan LoI dilaksanakan di kediaman Moh Ramdhan Pomanto yang terletak di Jalan Amirullah, Kota Makassar (Sulthoni, 2021). Beberapa bulan kemudian, Penjabat (PJ) Wali Kota Makassar, M. Iqbal Samad Suhaeb melakukan kunjungan ke Gold Coast. Akhirnya, Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU) ditandatangani pada tanggal 16 September 2023 oleh M. Iqbal Samad Suhaeb dan Wali Kota Gold Coast sendiri. Penandatanganan MoU disaksikan oleh Heru Hartanto Subolo selaku Konsul Jenderal Republik Indonesia di Sydney. Kedua kota mencapai kesepakatan untuk melakukan kerja sama di beberapa bidang, mencakup lingkungan, ekonomi kreatif, pengembangan kualitas sumber daya manusia, dan pariwisata (Arfah, 2019).

Sebelumnya melalui *sister city*, Gold Coast telah menjadi mitra dari kota-kota besar seperti Taipei dan Dubai. Oleh karena itu, Moh Ramdhan Pomanto selaku Wali Kota Makassar, sangat antusias menyambut program kerja sama ini mengingat Kota Makassar selangkah lebih maju dalam meningkatkan citra globalnya. Pada Maret 2019, dilaksanakan Forum Pariwisata Australia-Indonesia di Makassar. Melalui forum tersebut, Tom Tate sebagai Wali Kota Gold Coast menyuarakan optimisme bahwa Gold Coast dan Makassar dapat memperoleh banyak manfaat dari kerja sama mereka, terutama dalam bidang pariwisata. Tom Tate menjelaskan pentingnya kerja sama ini, mengingat banyak orang dari Sulawesi Selatan yang berkunjung ke Gold Coast, dan banyak orang dari Gold

Coast, Australia yang berkunjung ke Indonesia. Ia juga menjelaskan bahwa Kawasan Timur Indonesia (KTI) berpeluang menjadi wisata baru bagi masyarakat Australia yang selama ini terkonsentrasi di Bali (Mappong, 2019).

Kota Makassar dinilai sebagai kota berpotensi dalam hal tersebut karena letaknya yang strategis di Kawasan Timur Indonesia (Rafif dan Fauzi, 2017). Secara geografis, Makassar merupakan kota pesisir, sehingga di sekelilingnya terdapat banyak pantai yang dapat dimanfaatkan sebagai destinasi wisata. Selain keindahan pantainya, Makassar juga kaya akan sejarah, budaya serta kuliner (Rajab dan Nuryadin, 2020). Gold Coast sendiri merupakan kota yang terletak di Negara Bagian Queensland Australia dan juga dikelilingi oleh pantai-pantai yang indah. Karena keindahan alamnya, sektor utama sekaligus tulang punggung perekonomian Gold Coast adalah Pariwisata. Gold Coast menjadi salah satu kota destinasi wisata kesukaan masyarakat global (West dan Bayne, 2002).

Tom Tate menjelaskan bahwa setiap tahunnya, Gold Coast berhasil mendatangkan kurang lebih 30 juta wisatawan. Wali Kota Gold Coast tersebut memaparkan bahwa turis-turis tersebut layaknya bumerang yang jika dilempar, akhirnya akan datang kembali lagi. Seperti itulah kondisi pariwisata Gold Coast yang menguntungkan dan menjadikannya sebagai kota wisata dunia. Kamelia Thamrin Tantu, Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar saat itu mengutarakan kesenangannya karena Pemerintah Kota Gold Coast yang bekerja sama dengan Makassar dalam bidang pariwisata ini, sehingga Makassar diharap dapat memanfaatkan potensinya. Melalui kerja sama *sister city*, keduanya dapat saling membantu dan menguntungkan (Pranata, 2019).

Pariwisata sendiri merupakan salah satu bidang kerja sama yang sering dilaksanakan oleh pemerintah lokal melalui program *sister city*. Hal tersebut disebabkan oleh peran yang cukup penting yang dimainkan oleh pariwisata dalam meningkatkan pembangunan serta perekonomian daerah. Terjalannya program *sister city* antara Makassar dan Gold Coast dapat dimanfaatkan oleh keduanya untuk saling mempromosikan serta memajukan bidang pariwisata mereka. Makassar menawarkan keindahan alam, budaya, dan kuliner khas Sulawesi Selatan. Wisatawan dapat menikmati pantai-pantai indah, pasar tradisional, serta situs bersejarah seperti Benteng Rotterdam (Rajab dan Nuryadin, 2020). Di sisi lain, Gold Coast di Australia terkenal dengan pantainya yang spektakuler, kegiatan berselancar, olahraga air lainnya, serta taman hiburan (West dan Bayne, 2002). Melalui kerja sama *sister city*, kedua kota dapat saling mempromosikan daya tarik unik mereka dan mendorong pertukaran wisatawan. Kerja sama ini memungkinkan keduanya untuk berkolaborasi dan mengadopsi praktik terbaik satu sama lain.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis melihat bahwa kedua kota memiliki potensi di bidang pariwisata dalam kerja sama *sister city* mereka. Tentunya dalam kerja sama terdapat banyak hal yang mempengaruhi. Melalui penelitian ini, penulis bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis hal tersebut secara lebih mendalam. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk menjelajahi lebih lanjut dengan memilih judul penelitian, “Analisis Peluang dan Tantangan Kerja Sama *Sister City* Kota Makassar dan Gold Coast Queensland dalam Bidang Pariwisata”.

1.2 Batasan dan Rumusan Masalah

Setelah menguraikan latar belakang, penulis membatasi ruang lingkup penelitian ini dengan menitikberatkan pada kerja sama *sister city* antara Kota Makassar dan Kota Gold Coast sejak ditandatanganinya MoU oleh kedua kota pada tahun 2019, dimana kerja sama tersebut masih berlangsung hingga tahun 2023. Adapun untuk bidang kerja sama *sister city* yang dilakukan oleh kedua kota, penulis berfokus pada bidang pariwisata. Dengan batasan masalah tersebut, beberapa masalah akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana peluang kerja sama *sister city* Kota Makassar dan Gold Coast Queensland dalam bidang pariwisata?
2. Bagaimana tantangan kerja sama *sister city* Kota Makassar dan Gold Coast Queensland dalam bidang pariwisata?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini meliputi:

1. Mengetahui dan memahami peluang kerja sama *sister city* Kota Makassar dan Gold Coast Queensland dalam bidang pariwisata.
2. Mengetahui dan memahami tantangan kerja sama *sister city* Kota Makassar dan Gold Coast Queensland dalam bidang pariwisata.

Adapun melalui penelitian ini, penulis dapat memberikan beberapa kegunaan, yaitu:

1. Memberikan sumbangan informasi dan menambah pemahaman pembaca mengenai kerja sama *sister city* antara Kota Makassar dan Kota Gold Coast dalam bidang pariwisata.
2. Menjadi acuan dan tambahan referensi kepada mahasiswa/i ilmu hubungan internasional yang akan mengkaji mengenai kerja sama *sister city*.

1.4 Kerangka Konseptual

Terdapat tiga konsep dalam penelitian ini. Konsep tersebut meliputi, konsep paradiplomasi, kerja sama internasional, dan *sister city*, yang akan digunakan penulis untuk menganalisis peluang dan tantangan kerja sama *sister city* Kota Makassar dan Gold Coast Queensland dalam bidang pariwisata.

1.4.1 Paradiplomasi

Dalam hubungan internasional, diplomasi memegang peran yang sangat penting. Diplomasi sendiri dapat didefinisikan sebagai serangkaian upaya yang dilaksanakan oleh suatu negara guna memperjuangkan kepentingannya saat menjalin hubungan dengan negara lain, melalui proses perundingan, negosiasi, tawar-menawar, dan tidak bersifat memaksa (Ambarwati & Wijatmadja, 2016). Seiring perubahan zaman, proses diplomasi telah mengalami perkembangan. Adanya globalisasi menyebabkan perubahan pola aktivitas dan fenomena diplomasi di dalam dunia internasional. Diplomasi tidak lagi hanya dilakukan oleh negara atau pemerintah pusat. Pengaruh globalisasi menyebabkan kemunculan aktor-aktor baru, dimana aktor sub-nasional merupakan salah satunya. Aktivitas

dan diplomasi yang dilaksanakan oleh aktor sub-nasional dalam hubungan internasional disebut sebagai paradiplomasi (Mukti, 2013).

Konsep paradiplomasi atau paralel diplomasi pertama kali diperkenalkan pada tahun 1980 oleh ilmuwan Basque Country bernama Panayotis Soldatos. Soldatos menggambarkan paradiplomasi sebagai segala interaksi dan kegiatan yang dilaksanakan oleh aktor sub-nasional, meliputi pemerintah daerah dan kota dalam lingkup internasional. Paradiplomasi dalam hubungan internasional tergolong kajian baru, mengingat sebelumnya, hubungan yang dilakukan dalam lingkup global dilakukan oleh pemerintah pusat. Adanya paradiplomasi menyebabkan pelebaran aktivitas internasional suatu negara (Soldatos, 1990).

Paradiplomasi berkaitan dengan kemampuan pemerintah non-pusat yang secara independen dapat melakukan hubungan luar negeri guna mencapai kepentingan dari daerah atau kotanya (Mukti, 2013). Dalam buku *Theory and Practice of Paradiplomacy: Subnational Governments in International Affairs* (2015), Alexander S. Kuznetsov sebagai penulis menjelaskan bahwa paradiplomasi merupakan salah satu bentuk komunikasi politik dari pemerintah daerah yang diinisiatifkan secara mandiri oleh mereka. Paradiplomasi dilakukan guna melengkapi dan menyempurnakan pelaksanaan diplomasi suatu negara, karena dalam suatu negara terdapat banyak daerah beserta kota yang memiliki karakteristik mereka tersendiri, sehingga kepentingan dan kebutuhannya pun berbeda (Tavares, 2016).

Sependapat dengan pandangan ahli di atas, Michael Keating (2000) menggambarkan paradiplomasi sebagai bentuk diplomasi yang muncul dari perkembangan hubungan internasional. Hal ini ditandai dengan keterlibatan aktor sub-nasional, seperti pemerintah daerah dan pemerintah kota, dalam menjalankan hubungan luar negeri. Praktik paradiplomasi ini bertujuan untuk meningkatkan berbagai aspek di tingkat lokal, namun fokus utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan wilayah kota yang bersangkutan. Dengan demikian, paradiplomasi bukan hanya menjadi sarana untuk memperluas jaringan internasional, tetapi juga merupakan strategi untuk memberdayakan daerah dan meningkatkan kondisi hidup penduduk setempat. Pendekatan ini mencerminkan peran penting pemerintah lokal dalam konteks diplomasi global (Keating, 2000).

Paradiplomasi memberikan fleksibilitas kepada kota-kota untuk mengembangkan inisiatif dalam meningkatkan kualitas kota sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik mereka. Paradiplomasi memungkinkan mereka untuk merancang kerja sama yang lebih inovatif dan sesuai dengan lingkungan lokal (Mukti, 2013). Penulis akan menggunakan konsep paradiplomasi untuk mengidentifikasi kerja sama *sister city* antara Kota Makassar dan Kota Gold Coast dalam bidang.

1.4.2 Kerja Sama Internasional

Setiap negara di dunia sejatinya tidak dapat berdiri dan maju dengan sendiri. Untuk mengembangkan negara mereka, maka diperlukan bantuan negara lain. Bantuan tersebut dapat berupa kerja sama.

Abdulsyani (1994) menggambarkan kerja sama sebagai bagian dari interaksi sosial yang melibatkan adanya kolaborasi secara sinergis dengan memberikan dukungan aktif, sekaligus memiliki pemahaman yang mendalam tentang peran masing-masing. Melalui aktivitas-aktivitas yang terencana dan koordinasi yang baik, kerja sama menjadi pondasi untuk mencapai tujuan dan kepentingan yang sejalan dan telah ditetapkan.

Kerja sama internasional merupakan fenomena yang diyakini akan terus mendominasi hubungan internasional. Kerja sama internasional dapat dijelaskan sebagai bentuk kolaborasi yang melibatkan dua atau lebih negara, yang didasarkan pada struktur yang jelas dan terorganisir dengan baik, dengan tujuan berkelanjutan dalam menjalankan fungsinya. Kerja sama internasional dapat terjalin baik secara langsung antara negara-negara atau pemerintah, maupun melibatkan entitas non-pemerintah dari berbagai negara. Kerja sama internasional dapat diartikan sebagai langkah suatu negara dalam mencari keuntungan dan pemenuhan kebutuhannya dengan melibatkan negara atau pihak lain dalam konteks hubungan internasional. Kerja sama internasional dapat dilakukan dalam berbagai bidang, meliputi politik, budaya, perekonomian, keamanan, lingkungan, dan bidang-bidang lainnya (Perwita dan Yani, 2005).

Kerja sama internasional menurut Dougherty & Pflatzgraff (1997) merupakan segala macam bentuk hubungan yang dilaksanakan oleh negara dengan negara lainnya tanpa paksaan atau kekerasan dalam prosesnya, serta diikat secara sah melalui hukum yang. Dalam kerja sama, terdapat

tiga unsur inti, yaitu unsur pelaku, dapat berjumlah dua atau lebih, unsur interaksi, dan unsur tujuan bersama. Ketiga unsur tersebut saling terkait menciptakan kerangka kerja sama. Pelaku yang terlibat akan terikat satu sama lain karena adanya interaksi yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan kepentingan bersama para pihak yang terlibat. Pola tersebut memposisikan setiap unsur pada porsi yang seimbang, sehingga adanya keselarasan yang tercipta dan kerja sama dapat berjalan dengan lancar (Pamudji, 1985).

Holsti (1992) memaparkan bahwa kerja sama internasional dapat menggabungkan kepentingan, nilai, serta tujuan dari dua negara atau lebih, dimana penyatuan tersebut akan menghasilkan sesuatu yang dapat dipenuhi serta dipromosikan oleh pihak yang terlibat. Kerja sama internasional menyatukan negara dengan negara lainnya dengan harapan saling membantu untuk mencapai kepentingan dan tujuan yang ditetapkan. Holsti juga menjelaskan bahwa kerja sama internasional dilaksanakan karena semakin kompleksnya kehidupan manusia yang menyebabkan kemunculan isu-isu baru, serta karena adanya keinginan negara untuk mencari solusi dari permasalahan serupa. Agar kerja sama internasional dapat menghasilkan output yang memuaskan, diperlukan sesuatu yang dapat mengikat mereka, dimana dapat berupa aturan ataupun kesepakatan dalam melaksanakan kesepakatan yang disetujui bersama (Holsti, 1992).

Dalam hubungan internasional, kerja sama internasional dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu kerja sama regional, kerja sama

bilateral, dan kerja sama multilateral. Kerja sama regional dapat didefinisikan sebagai bentuk kerja sama yang melibatkan negara-negara yang berada dalam satu kawasan yang sama. Kerja sama bilateral merupakan kerja sama yang mencakup dua negara, sedangkan dalam kerja sama multilateral, lebih dari dua negara dapat terlibat dalam pelaksanaannya. Ketiganya mempunyai manfaat yang sama, yaitu untuk menghindari terjadinya konflik yang tidak diinginkan dan menjalin persahabatan antar negara. Namun kerja sama bilateral dinilai lebih efektif, karena dalam kerja sama bilateral, kepentingan dan fokus lebih tertata dan jelas tanpa terlalu banyak gangguan dari berbagai pihak. Sehingga dalam perumusan solusi, lebih mudah tercapai kesepakatan. Kerja sama bilateral juga bersifat lebih fleksibel karena hanya melibatkan dua negara, sehingga menghindari kendala-kendala birokrasi yang biasanya muncul dalam kerja sama multilateral dan regional (Perwita dan Yani, 2005).

Kerja sama *sister city* antara Makassar dan Gold Coast merupakan salah satu contoh dari kerja sama dalam bentuk bilateral, dimana hanya dua negara yang terlibat, Indonesia dan Australia. Namun karena perkembangan zaman dan berkaitan dengan konsep paradiplomasi, kerja sama internasional yang dilakukan dalam konteks ini berfokus pada satu kota dengan kota lainnya. Dengan menggunakan konsep kerja sama internasional, penulis akan menganalisis peluang kerja sama *sister city* Kota Makassar dan Gold Coast dalam bidang pariwisata.

1.4.3 *Sister City*

Sister city merupakan bentuk kerja sama internasional yang hadir melalui konsep paradiplomasi. *Sister city* dapat didefinisikan sebagai kerangka kemitraan yang melibatkan pemerintah daerah dalam dunia internasional. Kemitraan *sister city* atau kota kembar memiliki karakteristik tersendiri, yaitu muncul dari inisiatif pemerintah lokal bukan pemerintah pusat, bersifat berkelanjutan, dan diikat secara resmi melalui proses penandatanganan oleh dua kota yang terlibat. Melalui kerja sama *sister city*, dua kota yang menjalin kerja sama dapat saling bertukar pengalaman dan pengetahuan. Dalam era globalisasi, eksistensi kerja sama *sister city* sangat relevan karena merupakan sarana untuk memperkuat hubungan antarbangsa melalui tingkat pemerintah daerah (Campbell, 2015).

Konsep *sister city* dipopulerkan oleh kota-kota besar yang berada di benua Amerika dan Eropa. Kota-kota besar tersebut berkolaborasi untuk menciptakan keseimbangan dan kesetaraan dalam kondisi sosial ekonomi. Kerja sama *sister city* akan terus berlanjut selama kedua kota yang terlibat sama-sama menyetujui dan kerja sama memberikan dampak yang positif terhadap kepentingan dan kebutuhan kedua kota. Tujuan utama dari kerja sama *sister city* yakni menyatukan dua kota, bukan sebatas pemerintahannya saja, namun semua yang ada dalam lingkup kota tersebut, termasuk budaya dan masyarakat umum sekitarnya (Oetomo, 2010). *Sister city* bertujuan untuk menumbuhkan rasa saling mengerti

dengan memanfaatkan peluang yang dimiliki oleh kota guna meningkatkan mutu dan kualitas kota tersebut (Shaw dan Karlis, 2002). Terjalannya kerja sama *sister city* mendatangkan banyak keuntungan serta manfaat, beberapa diantaranya, yaitu pemanfaatan perdagangan internasional, peningkatan sektor ekonomi, pertukaran informasi serta budaya, peningkatan mutu pendidikan, dan perbaikan kualitas lingkungan. *Sister city* adalah langkah penting dalam kerja sama internasional dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal (Nuralam, 2018).

Sister city merujuk pada dua kata, *sister* (saudara) dan *city* (kota), yang mempunyai makna bahwa kerja sama bentuk ini dilakukan dengan dasar yang sangat menjunjung perdamaian. Makna saudara, atau yang sering kita sebut kembar dalam penggunaan Kota Kembar, adalah kedua kota tersebut, walaupun berasal dari negara berbeda, memiliki kemiripan, sehingga melalui hal tersebut, dapat terjadi pertukaran dan aksi saling memahami dari dua pihak (Souder dan Bredel, 2005).

Menurut Villiers (2009), secara umum pembentukan *sister city* melalui beberapa tahapan, yaitu pembentukan strategi dari pemerintah lokal, lalu mengidentifikasi mitra atau kota yang ingin diajak bekerja sama, kemudian mengevaluasi dan melakukan verifikasi terhadap profil kota calon mitra, berupa keadaan geografi, politik, visi misi, dan hal-hal berkaitan lainnya. Setelah itu, masuk ke dalam tahap negosiasi dimana proses negosiasi ini terbagi menjadi tiga, negosiasi memilih mitra, negosiasi perencanaan, dan negosiasi kesepakatan. Kemudian setelah

terjalannya kesepakatan, masuk ke tahap implementasi, yaitu pelaksanaan kerja sama yang perlu ditinjau secara berskala. Terakhir, kemampuan aliansi, merujuk pada keberlanjutan kerja sama. Apabila kerja sama dinilai efektif, maka perpanjangan kerja sama akan dipertimbangkan.

Adapun, dalam pelaksanaannya, kerja sama *sister city* memiliki beberapa bidang secara garis besar, yang kemudian dapat berkembang ke bidang-bidang lain. Donal Bell Souder dan Shanna Bredel (2005) memaparkan mengenai bidang-bidang tersebut, meliputi:

1. Budaya

Melalui *sister city*, kedua kota dari negara berbeda dapat saling belajar mengenai budaya masing-masing. Budaya yang dimaksud mencakup banyak hal, termasuk seni musik, seni tari, pakaian adat, adat istiadat, dan pertunjukan.

2. Akademik

Akademik dalam konteks kerja sama *sister city* dapat dilakukan dengan penempatan duta ataupun delegasi suatu negara di negara lainnya. Bidang akademik lainnya juga mencakup kerja sama dalam bidang pendidikan, seperti program beasiswa dan pertukaran pelajar.

3. Pertukaran Informasi

Dalam kerja sama *sister city*, adanya pertukaran informasi sangat diperlukan. Kerja sama dalam bidang ini dapat membantu kedua kota untuk saling melengkapi dan membantu

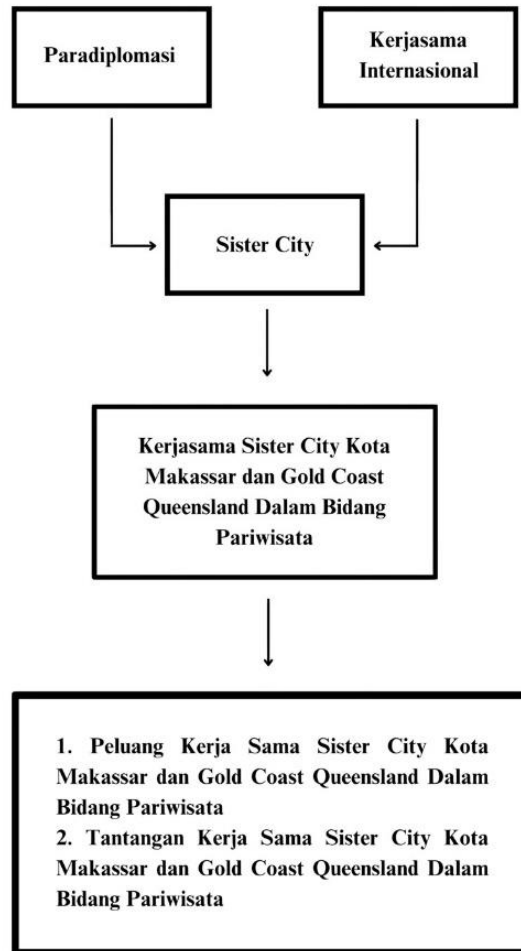
dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Pertukaran informasi yang dimaksud dapat mencakup banyak hal, meliputi pertukaran informasi etos kerja, pembangunan, tata kelola lingkungan dan sumber daya manusia.

4. Ekonomi

Bidang ekonomi dinilai sebagai bidang yang paling penting dalam kemitraan *sister city*. Alasannya adalah karena perekonomian suatu kota dapat mempengaruhi bidang-bidang lainnya. Kerja sama *sister city* dalam bidang ekonomi meliputi bidang perdagangan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan investasi.

Penulis memilih untuk meneliti lebih lanjut mengenai bidang pariwisata, karena seperti yang telah dijelaskan oleh Souder dan Bredel, perekonomian suatu kota merupakan hal yang sangat penting. Berhasilnya pembangunan suatu kota dipengaruhi oleh bagaimana laju perekonomian kota tersebut. Kerja sama *sister city* yang dilaksanakan oleh Kota Makassar dan Gold Coast meliputi lingkungan, pengembangan kualitas sumber daya manusia, ekonomi kreatif, serta pariwisata. Kerja sama *sister city* dalam bidang pariwisata sangat penting karena pariwisata selain meningkatkan citra nasional, pariwisata juga mendorong perkembangan ekonomi kota. Kota Makassar dan Gold Coast sudah memiliki potensi di bidang tersebut. Maka dari itu, penulis melihat bahwa melalui kerja sama *sister city*, kedua kota ini dapat saling mendorong dan mengembangkan pariwisatanya.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis dapat membuat bagan kerangka konseptual, sebagai berikut:



Bagan 1.1: Kerangka Konseptual Penelitian (dikelolah oleh penulis)

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah tipe penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dapat didefinisikan sebagai tipe penelitian yang menganalisis fenomena sosial secara mendalam dengan latar alaminya. Penelitian kualitatif bertitik berat pengamatan terhadap permasalahan yang ingin diteliti, bagaimana mau objek, subjek, serta elemen-elemen dari fenomena yang diteliti ini

saling mempengaruhi satu sama lain. Interaksi dari elemen tersebut akan membantu peneliti menarik hasil dan memahami permasalahan terkait. Hasil penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif dan dapat ditarik kesimpulan dari data yang diperoleh (Ali dan Yusof, 2011). Karenanya, melalui tipe penelitian kualitatif, penulis akan menganalisis kerja sama *sister city* Kota Makassar dan Gold Coast, bagaimana peluang dan tantangan kerja sama tersebut dalam bidang pariwisata.

1.5.2 Jenis Data

Penulis memanfaatkan dua jenis data dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Sugiyono (2019) menguraikan definisi data primer, yaitu jenis data, dimana proses pendapatannya tidak melibatkan pihak ketiga, atau secara langsung tanpa melalui perantara. Penulis memperoleh data primer dalam penelitian ini melalui wawancara dengan informan yang berupa pihak yang terlibat dan para ahli dalam kerja sama *sister city* Kota Makassar dan Gold Coast dalam bidang pariwisata.

b. Data Sekunder

Sugiyono (2019) juga menguraikan pengertian data sekunder. Berbeda dari data primer, data sekunder merupakan jenis data yang dikumpulkan menggunakan perantara atau secara tidak langsung. Data sekunder diperoleh melalui media. Penulis mengumpulkan

data ini melalui buku, artikel, jurnal, dan berita mengenai kerja sama *sister city* Kota Makassar dan Gold Coast.

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah *library research* (studi pustaka) dan wawancara. Pengumpulan data penelitian ini melibatkan berbagai macam sumber, dimulai dari buku, jurnal, artikel internet, berita, dan wawancara dari pihak terkait kerja sama *sister city* Makassar dan Gold Coast. Melalui dua teknik ini, penulis akan mengidentifikasi dan menemukan sumber yang memberikan informasi faktual atau pendapat ahli pribadi atas permasalahan penelitian. Adapun informan yang penulis wawancara meliputi:

1. Andi Zulfitra Dianta, S.IP, M.A (Kepala Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kota Makassar)
2. Safaruddin, S.S (Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Pemerintah Kota Makassar)

1.5.4 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Teknik ini digunakan untuk mengemukakan serta menganalisis suatu masalah dalam penelitian secara detail dan sesuai dengan data yang disediakan, sehingga teknik penelitian ini mengikuti fakta dari informasi yang ditemukan selama proses penelitian peluang dan tantangan kerja sama *sister city* Kota Makassar dan Gold Coast dalam bidang pariwisata. Teknik analisis data kualitatif mencoba untuk mengurai dan menjelaskan

suatu permasalahan dan membaca interaksi yang terjalin antara elemen yang satu dengan elemen lainnya, bagaimana mereka saling mempengaruhi dan apa yang dihasilkan.

1.5.5 Metode Analisis

Metode analisis dalam penelitian ini adalah deduktif. Metode deduktif merupakan metode penelitian yang berawal dari gagasan umum menjadi gagasan yang lebih spesifik (Suriasumantri, 2001). Karena itu, penulis akan menjelaskan secara umum permasalahan dalam penelitian ini, kemudian membahas permasalahan tersebut secara lebih spesifik, sehingga ditemukan kesimpulan yang sesuai dari data dan informasi yang telah dikumpulkan. Penulis akan menjelaskan secara umum mengenai kerja sama *sister city* kemudian membahas secara lebih rinci mengenai kerja sama *sister city* Kota Makassar dan Kota Gold Coast dan bagaimana peluang dan tantangan dari kerja sama tersebut di bidang pariwisata.

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terbagi menjadi lima bab. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian, meliputi:

Bab 1 Pendahuluan, membahas mengenai latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan penelitian.

Bab 2 Tinjauan Pustaka, membahas mengenai deskripsi dan penjelasan lebih dalam mengenai konsep digunakan dalam penelitian, yaitu paradiplomasi,

kerja sama internasional, dan *sister city*, serta penelitian-penelitian yang sebelumnya telah dilakukan.

Bab 3 Gambaran Umum, menjelaskan mengenai sejarah *sister city* secara global serta sejarah dan perkembangannya di Indonesia, kerja sama *sister city* Kota Makassar dan Kota Gold Coast, dan potensi pariwisata yang dimiliki oleh Kota Makassar dan Kota Gold Coast.

Bab 4 Analisis dan Hasil Penelitian, membahas mengenai hasil dari masalah yang diteliti, yaitu bagaimana peluang dan tantangan kerja sama *sister city* Kota Makassar dan Kota Gold Coast dalam bidang pariwisata.

Bab 5 Penutup, berisi kesimpulan inti dari penelitian, serta saran dari penulis untuk menyelesaikan dan memberi solusi dari permasalahan yang diteliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini, penulis akan membahas mengenai konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian, mencakup paradiplomasi, kerja sama internasional, dan *sister city*, serta penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

2.1 Paradiplomasi

Istilah paradiplomasi diambil dari bahasa Yunani, yaitu kata “para” yang memiliki arti samping, berdekatan, atau berdampingan. Konsep paradiplomasi telah diperkenalkan sejak tahun 1980 oleh Panayotis Soldatos dan dikembangkan oleh Ivo Duchacek. Konsep ini pertama kali digunakan saat debat mengenai federalisme baru. Pada saat itu, negara bagian merasa kekuasaan yang mereka pegang dari waktu ke waktu semakin berkurang, direbut oleh pemerintah federal. Karenanya sistem federalisme baru berusaha untuk mengembalikan sebagian besar kendali yang dipegang oleh pemerintah federal kepada negara bagian atau pemerintah lokal (Tavares, 2016).

Soldatos menjelaskan bahwa paradiplomasi berkaitan erat dengan kebijakan-kebijakan dan keputusan pemerintah non-pusat. Maka dari itu, paradiplomasi menurut Soldatos dan Duchacek (1990), merupakan segala aktivitas dan interaksi yang dilakukan oleh aktor-aktor sub-nasional dalam lingkup global dan internasional dengan tujuan agar tercapainya dan terpenuhinya tujuan dan kepentingan yang ingin dicapai oleh aktor sub-nasional, meliputi pemerintah daerah maupun pemerintah kota. Paradiplomasi merupakan upaya dan

usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah non pusat untuk mencapai tujuan mereka. Setiap negara memiliki kota dengan karakteristik masing-masing yang tidak dapat disamakan secara umum. Setiap kota berbeda dengan kota lainnya, sehingga penting untuk pemerintah daerah agar berusaha mencapai kepentingan daerahnya dengan usaha sendiri, namun tentu dengan persetujuan dari pemerintah pusat dan aturan yang mengatur suatu negara (Wolff, 2007).

Mukti (2013) mendefinisikan paradiplomasi secara umum yaitu mengacu pada interaksi aktor sub-nasional yang dilakukan dalam dunia internasional dengan mitra asing untuk meningkatkan aktivitas diplomatik. Karenanya, negara bukan lagi satu-satunya aktor yang dapat terjun ke dalam dunia internasional, aktor sub-nasional seperti pemerintah daerah dan kota juga dapat berkecimpung di dunia internasional untuk mencapai kepentingan dari daerah dan kota mereka. Paradiplomasi membantu mempermudah aktor sub-nasional untuk mencapai tujuan dan kepentingan daerah. Pemerintah daerah lebih mengenal kebutuhan dan karakteristik kotanya dibanding pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah sebagai aktor hubungan internasional membantu memperlancar tercapai tujuan serta teroptimalisasinya potensi daerah-daerah tersebut. Konsep paradiplomasi ini merupakan produk dari globalisasi yang menyebabkan terjadinya perkembangan diplomasi modern, dimana diplomasi tradisional sebelumnya hanya dilakukan oleh para aktor negara (Duchacek, 1984).

Paradiplomasi secara konseptual menjadi tantangan bagi disiplin ilmu hubungan internasional, dimana sebelumnya dalam hubungan internasional, aktor sub-nasional tidak begitu diperhatikan dan dibelakangkan. Walaupun seperti itu,

aktor sub-nasional sejatinya merupakan aktor yang juga memiliki peran penting dalam dunia internasional. Aktor sub-nasional memiliki hak untuk turun tangan dalam urusan dan hubungan internasional, selama mendapat persetujuan pemerintah pusat dan telah sesuai dengan tata cara serta hukum yang ditetapkan oleh negara yang menaunginya. Dapat dikatakan bahwa aktor sub-nasional ini mempunyai kedaulatan sendiri dalam memilih untuk terjun ke dalam dunia internasional (Alam dan Sudirman, 2020). Paradiplomasi merupakan penyerahan kekuasaan dan wewenang politik maupun administratif dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, guna mencapai tujuan daerah yang bersangkutan dengan cara melaksanakan hubungan dan interaksi dalam lingkup internasional, melalui serangkaian proses dan tata cara yang ditetapkan oleh negara (Soldatos, 1990).

Paradiplomasi tidaklah sama dengan kebijakan luar negeri suatu negara. Dikatakan tidak sama karena paradiplomasi dilakukan untuk mencapai kepentingan suatu daerah, bukan kepentingan negara secara keseluruhan atau kepentingan nasional. Paradiplomasi dilakukan untuk mencapai kepentingan daerah, sehingga bersifat lebih spesifik pada daerah tersebut. Walaupun paradiplomasi yang dilakukan suatu daerah dipayungi oleh pemerintah pusat, pemerintah daerahlah yang melaksanakan proses tersebut dengan menaati prosedur dan hukum yang diberlakukan oleh negara. Pemerintah pusat dapat membantu, namun inti utama dalam paradiplomasi dilakukan oleh pemerintah daerah yang terlibat. Paradiplomasi memungkinkan daerah untuk mengambil inisiatif dalam hal-hal seperti perdagangan internasional, investasi, hubungan kultural, atau kerja sama dengan daerah-daerah di luar negeri, sehingga

memungkinkan adanya pendekatan yang lebih spesifik dan terfokus pada tingkat lokal dalam urusan internasional (Keating, 2000).

Terjadinya paradiplomasi dipengaruhi dan didorong oleh beberapa faktor. Soldatos (1990) menguraikan faktor-faktor tersebut, sebagai berikut:

1. Dorongan yang disebabkan oleh perbedaan karakteristik suatu daerah dari daerah-daerah lainnya yang berada dalam satu negara yang sama (*objective segmentation*). Karakteristik tersebut dapat berupa keadaan geografis, visi dan misi ekonomi, kondisi masyarakat, dan lain sebagainya. Paradiplomasi juga dapat terlaksana dengan berdasar persepsi (*perceptual segmentation*) yang tetap berkaitan dengan *objective segmentation* serta elemen politik.
2. Tidak seimbangny pemerintah pusat dalam mewakili dan memenuhi kebutuhan pemerintah daerah. Dalam situasi dimana pemerintah pusat terkadang gagal mengatasi kebutuhan lokal dengan baik, daerah atau kota-kota merasa perlu untuk mengambil inisiatif mereka sendiri.
3. Adanya perkembangan globalisasi yang menyebabkan aktor-aktor sub-nasional ikut mengalami perkembangan dalam hal institusional dan ekonomi. Perkembangan tersebut akhirnya membuat aktor sub-nasional untuk meningkatkan perannya dalam dunia internasional.
4. Eksistensi gejala internasional mendorong adanya pola saling mengikuti, dimana aktor sub-nasional meniru atau mengikuti apa yang dilaksanakan oleh aktor sub-nasional lainnya.

5. Dalam perumusan kebijakan luar negeri, terdapat kesenjangan institusional yang menyebabkan pelaksanaan hubungan internasional pemerintah pusat kurang efektif.
6. *Nation building* suatu negara juga merupakan salah satu faktor pendorong daerah atau kota dalam negaranya melaksanakan paradiplomasi.
7. Adanya domestikasi isu politik luar negeri, dimana sebelumnya berfokus pada *high politics* dan bergeser ke *low politics*. Meningkatnya perhatian pada permasalahan politik tingkat rendah, mendorong para aktor sub-nasional untuk terjun ke dunia internasional. Mereka melihat kesempatan ini sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan, kepentingan, dan wewenang konstitusional di tingkat internasional, serta memperluas peran dalam perpolitikan global.

Dalam konsep paradiplomasi terdapat beberapa jenis paradiplomasi. Duchacek (1990) mengklasifikasikan paradiplomasi menjadi tiga tipe. Adapun bentuk-bentuk paradiplomasi menurut Duchacek meliputi:

1. *Trans-border regional paradiplomacy* (paradiplomasi lintas batas wilayah). Paradiplomasi tipe ini mengacu pada hubungan antara aktor sub-nasional dengan aktor sub-nasional lainnya yang jaraknya secara geografis masih tergolong berdekatan dan masih berbatasan secara langsung. Contohnya seperti kerja sama antara Kalimantan Utara, Indonesia dan Sabah, Malaysia dan kerja sama yang dilaksanakan oleh Washington, Amerika Serikat dan British Columbia, Kanada.

2. *Trans-regional paradiplomacy* (paradiplomasi lintas wilayah). Paradiplomasi lintas wilayah melibatkan aktor sub-nasional dari area yang, meskipun tidak berbatasan secara langsung, tetapi memiliki persamaan kawasan, atau berada dalam benua yang sama. Contoh paradiplomasi tipe ini meliputi, kerja sama Quebec, Kanada dan Louisiana, Amerika Serikat, dan kerja sama antara DIY, Indonesia dengan Gyeongsangbuk-do, Korea Selatan.
3. *Global paradiplomacy*. Paradiplomasi global mengacu paradiplomasi yang dimana aktor-aktor yang terlibat secara geografis tidaklah berdekatan dan juga tidak berada dalam kawasan yang sama, atau terletak di benua yang berbeda. Contoh dari paradiplomasi jenis ini yaitu kerja sama *sister city* antara kota Bandung, Indonesia dengan Kota Braunschweig, Jerman.

Panayotis Soldatos (1990) juga memberikan penjelasan mengenai bentuk paradiplomasi. Berbeda dari Duchacek yang mengklasifikasikan tipe paradiplomasi sesuai dengan wilayah aktor sub-nasional, Soldatos membagi paradiplomasi menjadi dua bentuk sesuai dengan tujuan dan isu yang diperjuangkan. Adapun klasifikasinya, meliputi:

1. *Global paradiplomacy*. Sesuai dengan namanya, paradiplomasi tipe ini memperjuangkan permasalahan atau isu yang bersifat global dan biasanya bersifat *high politics*. Contoh paradiplomasi ini adalah kebijakan Gubernur New Jersey dan New York terhadap aksi Uni Soviet yang menembaki pesawat Korean Airlines. Kedua gubernur

tersebut mengambil keputusan untuk tidak memperbolehkan pesawat Uni Soviet mendarat di wilayah mereka.

2. *Regional paradiplomacy*. Tipe ini merupakan paradiplomasi yang dilakukan dengan mengangkat isu dalam lingkup regional dan *low politics*. Contoh hasil dari paradiplomasi regional adalah pelaksanaan program kerja sama *sister city* kota-kota yang tersebar di dunia.

Dari uraian di atas, terlihat bahwa terjadi perkembangan dalam praktik diplomasi yang menunjukkan pergeseran dari fokus eksklusif pemerintah pusat ke inklusi peran aktif pemerintah daerah. Diplomasi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat sebagai perwakilan negara, tetapi juga bisa dilakukan oleh pihak-pihak sub-nasional seperti pemerintah lokal. Di Indonesia, paradiplomasi telah dilakukan oleh aktor sub-nasionalnya, tercermin dalam kerja sama *sister province* dan *sister city* di berbagai daerah. *Sister city* Kota Makassar dan Gold Coast merupakan bukti nyata pelaksanaan paradiplomasi entitas sub-nasional Indonesia, yaitu Pemerintah Kota Makassar.

2.2 Kerja Sama Internasional

Hammerstein (2003) menjelaskan bahwa konsep kerja sama internasional merupakan salah satu konsep yang sudah lama mendominasi hubungan internasional. Konsep ini memiliki sejarah yang sejajar dengan konsep konflik, dimana dari konsep konflik menyebabkan adanya keinginan untuk mencapai perdamaian, salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui kerja sama internasional. Karena itu, sejak dulu, kerja sama internasional sudah menjadi salah

satu fokus utama dalam disiplin ilmu hubungan internasional. Konsep kerja sama internasional diarahkan untuk menghindari peperangan serta konflik antar negara dan untuk mendorong terjadinya perdamaian dunia. Dalam kerja sama, diperlukan tiga unsur untuk mendorong pelaksanaannya. Ketiga unsur tersebut meliputi, unsur pelaku, unsur interaksi, dan unsur tujuan bersama. Ketiga unsur tersebut saling terkait satu sama lain. Unsur pelaku, aktor yang terlibat akan melakukan interaksi dalam upaya dan usaha untuk mencapai tujuan yang mereka sepakati (Pamudji, 1985).

Kerja sama internasional merupakan kerja sama pada tingkat global yang terbentuk karena terjadinya *nation understanding* atau keselarasan dan kesepahaman antar negara. Dalam kesepahaman tersebut, kepentingan maupun tujuan antara negara yang terlibat tidak harus identik satu sama lain. Kerja sama internasional dapat dilakukan secara langsung oleh negara, namun juga dapat dinaungi atau dijabatani oleh suatu organisasi internasional sebagai wadahnya. Koesnadi Kartasmita meyakini bahwa kerja sama internasional harus dan wajib dilakukan oleh suatu negara karena terdapat hubungan saling ketergantungan dan kehidupan masyarakat dunia yang kompleks dalam lingkup global (Kartasmita, 1983).

Saat ini, kerja sama internasional menjadi aspek yang sangat penting karena negara-negara di berbagai belahan dunia memiliki ketergantungan satu sama lain dalam upaya pemenuhan dan pencapaian tujuan nasional masing-masing. Kerja sama internasional terbentuk karena adanya upaya untuk memenuhi bidang-bidang kehidupan suatu negara, meliputi politik, budaya, keamanan,

ekonomi, dan ruang lingkup lainnya. Karena banyaknya kebutuhan yang diperlukan untuk memenuhi bidang tersebut, timbul beragam masalah dan isu yang harus diselesaikan oleh negara. Untuk menemukan solusi dari permasalahan yang sulit dipecahkan oleh negara sendiri, negara melakukan kerja sama dengan negara lain. Hal tersebut merupakan bukti bahwa kerja sama internasional merupakan manifestasi dari dependensi yang melekat dalam masyarakat internasional dan kehidupan negara. Dalam dunia yang terus berkembang, kerja sama internasional menjadi kunci untuk merespons perubahan dengan lebih efektif dan memastikan kesejahteraan negara (Perwita & Yani, 2005).

K.J Holsti memaparkan hal yang serupa, dimana ia menjelaskan bahwa awal terbentuknya kerja sama internasional adalah karena permasalahan negara yang bersifat regional dan global sangat beragam. Karena beragamnya permasalahan tersebut, perhatian dari satu negara tidaklah cukup, dibutuhkan perhatian lebih dari aktor lain. Untuk merespon permasalahan yang ada, negara dengan negara lainnya melakukan pendekatan dengan melibatkan penyampaian usulan solusi dalam menghadapi masalah, berpartisipasi dalam negosiasi dan diskusi masalah, menyajikan bukti teknis untuk mendukung argumen dan usulan masing-masing, dan mengakhiri proses perundingan tersebut dengan membentuk suatu kesepakatan bersama yang berupa perjanjian yang dinilai dapat memuaskan pihak-pihak yang terlibat (Holsti, 1992). Secara lebih detail, Holsti menjelaskan kerja sama internasional menjadi 5 definisi, meliputi:

1. Pandangan dimana bertemunya kepentingan, nilai, ataupun tujuan yang dapat berupa dua ataupun lebih menghasilkan sesuatu yang dijalankan dan dipromosikan para aktor yang terlibat.
2. Kesepakatan antara dua negara atau lebih untuk mengoptimalkan kesamaan kepentingan melalui penyelesaian masalah tertentu.
3. Pandangan negara yang berharap dengan adanya kebijakan yang ditetapkan bersama negara lain, dapat mendukung kepentingan dan tujuan nasionalnya tergapai.
4. Norma dan pedoman mengenai transaksi yang akan dilakukan negara di masa depan untuk mencapai tujuan dan kepentingannya.
5. Transaksi negara dengan negara lainnya dalam rangka pencapaian kesepakatan yang telah ditetapkan bersama (Holsti, 1992).

Karena itu dapat ditarik kesimpulan bahwa kerja sama internasional menurut Holsti dapat didefinisikan sebagai kerja sama yang menggabungkan dua atau lebih nilai dan kepentingan negara-negara dengan harapan tujuan negara-negara yang terlibat dapat tercapai.

Negara-negara menjalankan kerja sama internasional sebagai strategi dalam rangkai pencapaian tujuan dengan saling mengakomodasi kelebihan dan kekurangan masing-masing. Melalui kerja sama internasional, negara tidak hanya membangun fondasi kemitraan yang kokoh, tetapi juga menciptakan sinergi yang mendukung perkembangan positif. Kerja sama internasional membuka peluang bagi negara-negara yang terlibat untuk memanfaatkan keahlian dan sumber daya yang dimiliki secara efektif. Dengan demikian, upaya bersama ini tidak hanya

memajukan tujuan bersama, tetapi juga memberikan dorongan yang signifikan untuk kemajuan pembangunan di negara yang melakukan hubungan kerja sama (Widiastuti dan Wulandari, 2012).

Teuku May Rudy (2002) menjelaskan kerja sama internasional sebagai bentuk kolaborasi kerja sama yang dalam pelaksanaannya melewati batas negara. Kerja sama internasional memiliki dasar strukrur yang terorganisir, sehingga strukturnya bersifat lengkap dan jelas agar fungsinya dapat terlaksana dengan optimal. Kerja sama internasional diperlukan untuk mencapai tujuan yang dapat dilakukan oleh antar sesama aktor negara, pemerintah dengan pemerintah lain, maupun antara aktor non-pemerintah di berbagai negara. Adapun, terdapat beberapa tujuan suatu negara melakukan kerja sama internasional. Tujuan tersebut, meliputi:

1. Memenuhi kebutuhan penduduk setiap negara secara memadai.
2. Mengantisipasi dan mengurangi potensi konflik yang dapat timbul.
3. Mendapatkan validasi dari negara lain sebagai negara yang merdeka.
4. Memperkuat hubungan yang ada dengan negara lain dalam berbagai macam bidang.
5. Mendorong dan memberi kontribusi terhadap pertumbuhan dan peningkatan ekonomi.
6. Mengeksplorasi serta mengoptimalkan pemanfaatan potensi dalam mengembangkan negara.
7. Memberantas kemiskinan negara.

8. Mendorong pertumbuhan perdagangan agar tercapai kesejahteraan negara (Widiastuti dan Wulandari, 2012).

Substansi utama dari kerja sama internasional terletak pada seberapa jauh manfaat yang didapat melalui kerja sama tersebut sehingga dapat memperkuat ide mengenai kepentingan tindakan yang bersifat satu pihak dan kompetitif. Pelaksanaan kerja sama internasional dapat melibatkan berbagai macam bidang, termasuk politik, keamanan dan pertahanan, perkembangan ekonomi, sosial dan budaya, serta bidang-bidang pembangunan lainnya. Keberhasilan kerja sama internasional tergantung pada kemampuan negara-negara yang terlibat dalam mengatasi perbedaan dan permasalahan yang ada di antara mereka (Perwita & Yani, 2005).

Untuk melakukan kerja sama internasional, terdapat setidaknya dua syarat yang harus dipenuhi. Syarat pertama, negara yang ingin melaksanakan kerja sama internasional harus menghargai dan menghormati kepentingan serta nilai nasional yang dipegang masing-masing. Adapabila tidak ada rasa saling menghargai, maka pelaksanaan kerja sama bukannya mencapai kepentingan seperti yang diinginkan dan perdamaian, malah akan memicu penimpulan konflik antara negara-negara yang terlibat. Syarat kedua, yaitu setiap negara yang terlibat menyepakati keputusan dan solusi dalam permasalahan atau isu yang ingin diselesaikan. Agar tercapainya hal tersebut diperlukan komunikasi yang jelas dan upaya saling mengerti antara anggota kerja sama (Dam dan Riswandi, 1996).

Kerja sama internasional dapat dibagi menjadi tiga bentuk, Dougher & Pfaltzgraff (1997) mengklasifikasikannya sebagai:

1. Kerja sama bilateral. Kerja sama tipe bilateral merupakan bentuk kerja sama yang hanya dilakukan oleh dua aktor dan didasari oleh hubungan diplomatik kedua negara yang berjalan baik. Contoh kerja sama bilateral yang paling sering dilakukan adalah kerja sama dalam bidang ekonomi dan pariwisata.
2. Kerja sama multilateral. Berbeda dari kerja sama bilateral, kerja sama multilateral dilakukan oleh lebih dari dua negara dan tidak memiliki batasan anggota kerja sama ataupun batasan jarak wilayah. Salah satu contoh kerja sama multilateral adalah Organisasi Konferensi Islam (OKI).
3. Kerja sama regional. Bentuk yang terakhir, yaitu kerja sama regional yang berarti kerja sama yang dilakukan oleh negara-negara dalam kawasan wilayah yang sama. Contoh kerja sama regional adalah ASEAN, yang merupakan kumpulan negara-negara yang berada di Asia Tenggara.

Mayoritas pelaksanaan kerja sama internasional oleh negara-negara di dunia dilakukan secara bilateral (Rudy, 2002). Didi Krisna (1993) mendefinisikan hubungan bilateral sebagai bentuk dari interaksi timbal balik antara dua aktor yang memiliki pengaruh satu sama lain dalam berbagai aspek dengan tujuan mensejahterakan masyarakatnya serta mendorong perdamaian dunia, dengan menghindari aksi saling mengabaikan eksistensi negara satu sama lain. Kerja

sama bilateral dinilai lebih efektif karena dalam pelaksanaannya hanya terdapat dua aktor atau negara di dalamnya. Bilateralisme mengacu pada hubungan yang dijalankan oleh dua negara terhadap politik serta budaya. Prinsip utama dalam diplomasi bilateral adalah para negara dengan negara lainnya memelihara hubungan yang baik agar hubungan tersebut dapat bersifat berkelanjutan. Kerja sama bilateral ini dilakukan untuk memaksimalkan keuntungan yang ingin dicapai (Rana, 2002). Karena hanya melibatkan dua aktor, maka proses pelaksanaan kerja sama untuk mencapai tujuan dan keuntungan akan lebih mudah, hal ini dikarenakan tidak banyak gangguan dari pihak-pihak lain.

Masuknya aktor non-nasional dalam hubungan internasional, memungkinkan aktor-sub nasional ikut serta dalam pelaksanaan kerja sama internasional. Kerja sama internasional tidak lagi eksklusif dilakukan oleh pemerintah pusat negara, tetapi pemerintah lokal atau daerah negara tersebut juga juga dapat melakukannya. Hal ini dikarenakan kerja sama internasional juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pembangunan daerah. Adapun di Indonesia, partisipasi pemerintah daerah dalam kerja sama internasional dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri pasal 1 ayat 1. Dalam peraturan undang-undang tersebut dijelaskan mengenai pengertian dari hubungan internasional, dimana hubungan luar negeri didefinisikan sebagai semua aktivitas terkait dengan dimensi regional maupun internasional dimana aktor pelaksanaannya merupakan pemerintah tingkat pusat dan pemerintah tingkat daerah, maupun lembaga-lembaga lainnya, juga mencakup organisasi politik dan organisasi masyarakat, badan usaha, organisasi nirlaba

masyarakat, hingga masyarakat atau warga negara Indonesia sendiri (UU No. 37 Tahun 1999).

Selain pada peraturan UU tersebut, hukum keterlibatan pemerintah daerah dalam hubungan internasional juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah pasal 363 ayat 1 dan 2. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa pemerintah daerah dapat menjalankan kerja sama untuk memajukan serta mensejahterakan rakyatnya. Pemerintah daerah diperbolehkan melaksanakan kerja sama dengan daerah lain, pihak-pihak ketiga, dan juga pemerintah daerah di luar negeri dengan memberi pertimbangan yang besar terhadap penggunaan sumber daya yang efektif. Hal tersebut menunjukkan bahwa, pemerintah daerah di Indonesia disarankan untuk melakukan kerja sama internasional sebagai upaya untuk memajukan daerahnya (UU No. 23 Tahun 2014).

Pemerintah Daerah Kota Makassar telah melakukan partisipasinya dalam kerja sama internasional, yaitu kerja sama *sister city* kota Makassar dan Gold Coast yang terletak di Queensland, negara bagian Australia yang terjalin pada tahun. Dalam penelitian ini, fokus penulis adalah terhadap kerja sama tersebut, dimana kerja sama antara keduanya merujuk pada bentuk kerja sama bilateral, karena hanya terdapat dua aktor yang terlibat, yaitu Pemerintah Kota Makassar dan Pemerintah Kota Gold Coast. Kedua kota menjalin kerja sama *sister city* sejak tahun 2019, dengan mencakup beberapa bidang, meliputi lingkungan, ekonomi kreatif, pengembangan kualitas sumber daya manusia, dan pariwisata. Seperti penjelasan mengenai kerja sama internasional di atas, latar belakang terjalinnya

kerja sama *sister city* antara Makassar dan Gold Coast dalam bidang pariwisata adalah karena keinginan keduanya untuk mencapai keuntungan dan tujuan dalam meningkatkan sektor pariwisata mereka.

2.3 Sister City

Mengutip dari *Sister Cities Internasional* (SCI, 2013), *sister city* atau kerap dikenal juga sebagai kota kembar merupakan sebuah kerja sama atau kemitraan yang bersifat jangka panjang dengan melibatkan dua kota dari negara yang berbeda sebagai aktornya, dimana kedua kota tersebut akan terikat dalam suatu perjanjian secara resmi dan formal atau disebut sebagai *Memorandum of Understanding*. Adanya perkembangan dalam studi ilmu hubungan internasional, membuat peran aktor sub-nasional seperti pemerintah daerah dan kota dapat berpartisipasi dalam program *sister city* ini. *Sister city* dapat didefinisikan sebagai hubungan antara dua kota yang bersifat formal dan melintasi batas negara, dengan syarat kedua kota tersebut berada pada tingkat yang setara. Konsep *sister city* diterapkan dengan tujuan agar kedua kota dapat menjalin kemitraan dengan sama-sama saling membantu dalam upaya pencapaian kepentingan masing-masing (O'Toole, 2001). *Sister city* merupakan konsep kerja sama yang diterapkan dua aktor berupa kota yang berada di negara berbeda, dengan tujuan memperkuat dan meningkatkan mutu kedua kota tersebut melalui hubungan dalam berbagai bidang yang berkesinambungan, termasuk sosial budaya, lingkungan, ekonomi, dan bidang-bidang lainnya (Nuralam, 2018).

Kerja sama *sister city* memiliki sifat dan karakteristik yang luas. *Sister city* merujuk pada konsep kolaborasi antar kota yang memiliki waktu pelaksanaan yang bersifat jangka panjang. Awal mula penerapan konsep *sister city* diadopsi oleh kota-kota berlokasi di negara maju yang berada di benua Amerika dan Eropa. Kota-kota tersebut menerapkan konsep dimana mereka bekerja sama guna mendorong terjadinya keseimbangan dan kesetaraan antara satu sama lain. Adanya arus globalisasi menyebabkan perkembangan zaman dimana kota-kota lain ikut menerapkan konsep kerja sama ini (Oetomo, 2010). Pada awalnya kerja sama *sister city* dilakukan semata-mata hanya untuk menjalin persahabatan antara kedua kota. Persahabatan tersebut terjalin karena didasari oleh jarak kota yang berdekatan maupun adanya persamaan karakteristik antara mereka. Namun seiring perkembangan zaman, jarak bukan lagi penghalang dalam kerja sama ini. *Sister city* saat ini dapat dilakukan terlepas dari jarak kedua kota yang berjauhan secara geografis. Berawal dari niat persahabatan, kerja sama *sister city* berkembang menjadi lebih luas dan kompleks. *Sister city* kini merupakan upaya strategis yang dilakukan oleh pemerintah non-pusat dalam membangun kota atau wilayahnya (Rochman, 2019).

Sister city berkaitan erat dengan konsep paradiplomasi, dimana aktor pemerintah lokal melakukan hak dan kewenangannya untuk terjun ke dalam dunia internasional. *Sister city* dapat diibaratkan sebagai hubungan “sahabat pena” antara kota yang terlibat. Kota-kota yang berada dalam program *sister city*, layaknya sahabat pena, akan menjalin persahabatan dan saling melakukan hubungan timbal balik berupa informasi mengenai tata cara pengelolaan potensi

untuk memajukan kota. Awalnya, kerja sama ini bertitik berat pada hubungan saling tukar menukar budaya dan upaya peningkatan sektor pendidikan. Namun seiring waktu, kerja sama *sister city* dikembangkan untuk memajukan bidang-bidang lainnya, terutama dalam konteks ekonomi. *Sister city* digunakan oleh pemerintah lokal sebagai salah satu upaya dalam mendorong perekonomian, membantu pariwisata, dan menciptakan jaringan-jaringan bisnis dengan pihak luar negeri, sehingga keuntungan dari *sister city* dapat dioptimalkan dan dampaknya berkelanjutan (Sinaga, 2010).

Terdapat beberapa faktor yang mendorong pemerintah daerah menerapkan konsep *sister city*. De Villiers mengklasifikasikan faktor-faktor tersebut meliputi, perkembangan dalam pola komunikasi, adanya peningkatan demokrasi dan desentralisasi global, pertumbuhan organisasi-organisasi non-pemerintah, dan juga eksistensi globalisasi yang menyebabkan perubahan dalam tatanan sosial dunia dengan cepat (Villiers, 2009). Selain itu, dalam pelaksanaan *sister city*, pemerintah daerah mempunyai faktor-faktor yang dijadikan sebagai pertimbangan. Yang pertama adalah, faktor sejarah. Suatu kota apabila memiliki hubungan yang baik dengan kota lain sebelumnya dan memiliki sejarah tersendiri, maka kemungkinan terjadinya kerja sama akan lebih besar dibanding kota yang tidak memiliki sejarah tersebut ataupun memiliki sejarah yang kurang berkenan. Faktor kedua, yaitu budaya. Apabila kota satu dengan kota lainnya memiliki kesamaan dan rasa saling mengerti terhadap budaya satu sama lain, maka dalam paradiplomasi, kedua kota tersebut lebih aktif sehingga kerja sama *sister city* lebih memiliki peluang yang besar. Dan yang terakhir, kondisi politik. Apabila kondisi

politik kedua kota dari negara berbeda tidak sejalan, maka besar kemungkinan akan memicu konflik, meninggalkan arti sejati konsep *sister city*, menjalin persahabatan (Zelinsky, 1991).

Dalam *sister city*, terdapat beberapa prinsip yang menjadi acuan oleh pemerintah daerah. Setiap kota memiliki prinsip acuannya tersendiri, namun secara umum, *Council Policy* Kelowna menjelaskan prinsip-prinsip tersebut. Prinsip yang pertama, yaitu kedua kota untuk melakukan kerja sama *sister city* harus memiliki persamaan atau kemiripan. Prinsip kedua adalah kota yang ingin menerapkan program *sister city* memiliki potensi untuk terjadinya proses saling tukar menukar dalam berbagai macam hal, termasuk edukasi, kebudayaan, wisata, dan perekonomian. Ketiga, terdapat hubungan timbal balik yang positif di antara kedua pelaku. Prinsip keempat adalah kerja sama tersebut selain diarahkan oleh pemimpin yang menjalankan tugasnya dengan baik, juga diikuti oleh keterlibatan masyarakat kota tersebut. Kelima, kerja sama yang terjalin harus memiliki manfaat kepada kedua kota dalam program tersebut. Keenam, yaitu kota yang ingin menjalin kerja sama *sister city* tidak memiliki kerja sama *sister city* dengan kota lain yang berdekatan dengan kota mitra. Dan terakhir, keadaan politik kedua kota dari negara berbeda harus bersifat stabil (Sulthoni, 2021).

Adapun, prinsip pelaksanaan *sister city* di Indonesia sendiri didasari oleh beberapa syarat yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 25 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri

dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar negeri. Kerja sama *sister city* Makassar dan Gold Coast resmi berjalan setelah ditandatanganinya MoU oleh kedua pihak pada tahun 2019, maka pada saat itu, aturan yang menjadi prinsip kerja sama *sister city* keduanya merupakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2008. Di dalam aturan tersebut, pasal 5 menjelaskan mengenai persyaratan dari kerja sama kota kembar atau *sister city*, yang meliputi:

1. Status administrasi yang setara.
2. Memiliki persamaan dalam karakteristik.
3. Mempunyai masalah yang sama.
4. Adanya upaya untuk melengkapi satu sama lain.
5. Meningkatkan hubungan yaang ada antar masyarakat (Permendagri No. 3 Tahun 2008).

Persyaratan tersebut sejalan dengan yang dipaparkan oleh De Villiers, dimana ia menjelaskan bahwa konsep kesamaan dalam kerja sama *sister city* dibutuhkan guna mendukung kepentingan dan kelancarannya. Kesamaan karakteristik serta kemiripan kota adalah pertimbangan paling penting yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebelum menjalin kerja sama *sister city*. Adapun, dari program kerja sama ini, dapat didatangkan beberapa keuntungan. Keuntungan tersebut meliputi:

1. Melalui *sister city*, dua kota dapat berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka dalam bidang-bidang yang telah disetujui untuk dikerjakan samakan.

2. Menggalakkan dan merangsang keterlibatan aktif pemerintah lokal dan pihak-pihak terkait lainnya.
3. Memperkuat hubungan antara kota yang menjalin program *sister city* sehingga tercipta persahabatan jangka panjang.
4. Sebagai peluang untuk satu kota dengan kota lainnya melakukan pertukaran dan saling belajar mengenai kebudayaan dalam rangka memperkaya budaya daerah (Nuralam, 2018).

Karena keuntungan tersebut, banyak pemerintah kota yang melaksanakan kerja sama *sister city*. Namun selain keuntungan yang diharapkan diperoleh, dalam upaya pelaksanaannya, terdapat beberapa faktor yang dapat menghambat jalannya kerja sama tersebut. Berdasarkan argumen-argumen yang dikemukakan oleh Setiawan (2002), Kuncoro (2004), Dwiyanto (2009), serta Wahyudi dan Maria AP (2011), Nuralam (2018) menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang mencegah kelancaran *sister city* meliputi, kekurangan rasa sadar terhadap pentingnya kerja sama, adanya ketidakselarasan dalam kepentingan, prioritas, serta *political will*. Faktor lainnya yaitu, permasalahan dalam legalitas kemitraan, kurangnya komunikasi dan sinkronisasi antara aktor yang terlibat dan juga bidang yang dimitrakan. Adanya ketergantungan terhadap pemerintah pusat juga menjadi faktor kerja sama *sister city* terhambat. Selain itu, kurangnya sumber daya manusia (SDM) dan anggaran yang tersedia tidak cukup memenuhi juga menjadi penghalang kerja sama untuk berjalan lancar. Faktor penghambat lainnya yang cukup krusial adalah permasalahan letak geografis antara kedua kota yang melakukan kerja sama.

Souder dan Bredel (2005) menjelaskan bahwa dalam pelaksanaannya, secara garis besar *sister city* dapat dilakukan dalam berbagai macam bidang yang dapat dikembangkan, yaitu:

1. Budaya. Awal mula terbentuknya *sister city* berfokus pada bidang budaya. *Sister city* dibentuk agar kedua kota dapat saling belajar mengenai kebudayaan satu sama lain, dengan hal tersebut, kedua kota dapat memperkaya kebudayaan mereka. Hingga kini, kerja sama *sister city* di bidang budaya masih aktif dilakukan. Kerja sama dalam bidang kebudayaan dapat mendorong terjalinnya persahabatan yang erat antara kedua kota dikarenakan adanya proses saling mengerti dan memahami mengenai hal yang identik dan merupakan latar belakang dari suatu kota.
2. Akademik. Bidang kerja sama lainnya meliputi akademik. Dalam *sister city*, kerja sama bidang ini dapat dilaksanakan dengan menempatkan duta atau delegasi negara di kota negara tempat ia menjalin mitra. Spesifiknya adalah, apabila suatu kota dari negara A melakukan kerja sama *sister city* dengan kota negara B, maka negara A dapat menempatkan delegasinya di kota negara B yang menjalin kerja sama dengannya. Bidang akademik lainnya juga mencakup kerja sama di bidang pendidikan, dimana dapat dilakukan berbagai macam program, salah satu contohnya adalah program beasiswa dan pertukaran pelajar.
3. Pertukaran Informasi. Pelaksanaan *sister city* sangat memerlukan terjadinya pertukaran informasi. Dalam bidang pertukaran informasi,

kedua kota dapat saling berbagi info dalam berbagai macam hal, termasuk pertukaran informasi etos kerja, pembangunan, tata kelola lingkungan dan sumber daya manusia, serta informasi-informasi lainnya dalam upaya membangun dan memanfaatkan kota. Adanya pertukaran informasi akan membuat kota-kota yang terlibat belajar lebih dalam dan berusaha untuk menerapkan informasi yang dipelajari dari kota yang ditemani bekerja sama sehingga dapat diterapkan untuk menjadi solusi dalam meningkatkan kualitas dan pembangunan kota.

4. Ekonomi. Bidang ekonomi diyakini sebagai bidang terpenting dalam *sister city*. Perekonomian suatu kota sangatlah krusial dalam membangun kota tersebut karena dapat berdampak pada banyak bidang. Kerja sama *sister city* yang sebelumnya terfokus pada bidang budaya dan pendidikan, beralih fokus pada bidang ekonomi. Hal ini dikarenakan, perekonomian merupakan roda yang mengatur seberapa maju kota tersebut. Apabila perekonomian suatu kota berjalan lancar, maka hal tersebut akan menjadi faktor pendorong bidang yang lainnya untuk ikut berjalan dengan baik. Sebaliknya, apabila perekonomian kota tidak berlangsung dengan baik, maka bidang yang lain akan mengalami keterhambatan pertumbuhan. Dalam pelaksanaannya, kerja sama *sister city* ekonomi dapat dilakukan dalam bidang perdagangan, investasi, ekonomi kreatif, dan juga pariwisata.

Sedangkan dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 09/A/KP/XII/2006/01 Bab III, kerja sama yang dilakukan oleh daerah dengan

pihak luar negeri dapat dilakukan meliputi kerja sama sosial budaya yang berupa bidang pendidikan, kesehatan, kepemudaan, kewanitaan, olahraga, dan keseruan lainnya. Kemudian dapat juga bergerak di perekonomian, mencakup bidang perdagangan, investasi, ketanagakerjaan, kelautan dan perikanan, teknologi, kehutanan, pertanian, pertambangan, dan pariwisata. Serta bidang-bidang lainnya yang dinilai dapat meningkatkan pembangunan kota (Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 09/A/KP/XII/2006/01).

Kerja sama *sister city* antara kota Makassar dan Gold Coast dilakukan dalam beberapa bidang, salah satunya adalah pariwisata. Kerja sama *sister city* dalam bidang pariwisata sudah sering dilakukan oleh kota-kota di dunia, termasuk kota Indonesia. Hal ini dikarenakan, bidang pariwisata apabila dikelola dengan baik memiliki peluang kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pariwisata sendiri menurut *World Tourism Organization* merupakan aktivitas individu maupun kelompok yang bepergian tidak secara berturut-turut dalam waktu tidak lebih dari setahun di luar dari tempat dan lingkungan sehari-harinya dengan tujuan kepuasan berupa liburan, bisnis, dan tujuan-tujuan lainnya (WTO, 1999). Bidang pariwisata dalam kerja sama *sister city* mempunyai kelebihan tersendiri. Melalui kerja sama *sister city*, dapat didapatkan kelebihan, seperti promosi budaya dan wisata akan bersifat berkelanjutan karena *sister city* tidak hanya berlangsung satu atau dua tahun saja, kemudian juga dapat dilakukan kolaborasi-kolaborasi dengan negara mitra sehingga pariwisata mereka dapat diperkenalkan kepada masyarakat asing (Sunarko dan Yuniati, 2020).

Pariwisata merupakan industri yang bersifat luas dan kompleks. Selain berkaitan dengan bidang ekonomi, juga dapat terhubung dengan bidang budaya. Untuk melaksanakan *sister city* dalam bidang pariwisata, kota yang terlibat harus memiliki daya tarik pariwisata, yang dapat berupa keindahan alam maupun buatan, aneka ragam kuliner, dan daya tarik lainnya (Ramadhan, 2021). Makassar, dengan kekayaan sejarah dan keindahan alamnya, serta Gold Coast, yang terkenal dengan pantainya yang memukau, keduanya memiliki potensi wisata yang unik. Maka dari itu, kerja sama *sister city* dalam bidang pariwisata di antara keduanya dinilai memiliki peluang. Namun, seperti kerja sama lainnya, pelaksanaannya juga memiliki tantangan yang harus dihadapi. Karena itulah penelitian ini akan membahas lebih lanjut mengenai peluang dan tantangan kerja sama *sister city* antara Kota Makassar dan Gold Coast dalam bidang pariwisata.

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan komponen dari penelitian yang digunakan sebagai pembandingan antara penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Tujuan dari menyertakan penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah untuk menemukan persamaan dan perbedaan antara penelitian yang sedang diteliti dan penelitian sebelumnya, sehingga dapat ditemukan keunggulan serta kelemahan dari penelitian terdahulu, yang dapat disempurnakan oleh penelitian yang sedang dilakukan. Penelitian terdahulu memiliki tujuan, yaitu menghindari persamaan antara penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menganalisis mengenai bagaimana peluang dan tantangan kerja sama *sister city* Kota Makassar dan Kota Gold Coast dalam bidang pariwisata, dengan

menggunakan beberapa konsep, meliputi paradiplomasi, kerja sama internasional, serta *sister city*. Sebelumnya telah dilakukan beberapa penelitian dengan topik dan permasalahan yang relevan. Adapun beberapa penelitian tersebut meliputi:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Fahmi Sulthoni dengan judul “Analisis Kerja sama Antar Pemerintah Kota: Studi Kasus *Sister City* Kota Makassar dan Kota Gold Coast” pada tahun 2021. Dalam penelitian terkait, Sulthoni menggunakan konsep-konsep, seperti paradiplomasi, *sister city*, otonomi daerah, dan pemerintah daerah, untuk menganalisis lebih dalam proses peninjauan serta koordinasi antara Pemerintah Kota Makassar dan pihak-pihak lainnya yang terlibat dalam kerja sama *sister city* Kota Makassar dan Gold Coast, termasuk Pemerintah Kota Gold Coast, Pemerintah Pusat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar. Secara garis besar, penelitian terkait membahas mengenai bagaimana proses kerja sama *sister city* antara kedua kota disetujui secara resmi. Perbedaan antara penelitian oleh Sulthoni dan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Sulthoni hanya membahas mengenai proses terjalannya kerja sama *sister city* Kota Makassar dan Kota Gold Coast, sementara penelitian ini berfokus pada bagaimana peluang dan tantangan kerja sama *sister city* kedua kota dalam bidang pariwisata.

Penelitian Kedua, yaitu “Peluang dan Tantangan Kerjasama *Sister City* antara Makassar dan Gold Coast Australia” yang dilakukan oleh Dion Darmawan Warzuqni pada tahun 2021. Dalam penelitian terkait, Warzuqni menggunakan konsep paradiplomasi dan kerja sama internasional untuk menganalisis masalah. Untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh

Warzuqni, penulis melalui penelitian ini membahas secara spesifik mengenai peluang dan tantangan kerja sama *sister city* Kota Makassar dan Gold Coast dalam bidang pariwisata. Penelitian milik Warzuqni membahas mengenai peluang dan tantangan kerja sama *sister city* milik Makassar dan Gold Coast, namun hanya secara umum. Karena itulah, untuk membedakan kedua penelitian, dalam penelitian ini, penulis akan berfokus dalam bidang pariwisata yang dilakukan oleh kedua kota. Penelitian ini juga melengkapi penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Warzuqni, mengingat kerja sama *sister city* Kota Makassar dan Gold Coast sempat mengalami keterhambatan yang dikarenakan oleh Pandemi COVID-19.

Penelitian ketiga, yaitu “Paradiplomasi Menuju Kota Dunia: Studi Kasus Pemerintah Kota Makassar” oleh Laode Muhammad Fathun pada tahun 2016. Dalam penelitian terkait, Fathun menggunakan konsep paradiplomasi dan otonomi daerah untuk mengkaji lebih dalam mengenai Pemerintah Kota Makassar sebagai salah satu aktor sub-nasional melakukan praktik paradiplomasi dalam mencapai tujuannya untuk menjadi kota dunia. Dalam penelitian terkait Fathun menjelaskan mengenai pentingnya pembangunan ekonomi dalam mengantar Kota Makassar menjadi kota dunia. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Fathun dan penelitian ini berada pada fokus penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Fathun berfokus pada bagaimana paradiplomasi dapat mengantar Kota Makassar mencapai tujuannya dalam menjadi kota dunia, sedangkan dalam penelitian ini, penulis berfokus pada peluang dan tantangan *sister city* dalam bidang pariwisata yang dilakukan oleh Kota Makassar dan Kota Gold Coast.